

## DAFTAR PUSTAKA

- Bantaeng.go.id (2022) <http://disdukcapil.bantaengkab.go.id/> (diakses pada 21 Juni 2022)
- Bantaeng.go.id (2022) <https://bantaengkab.bps.go.id/> (diakses pada 1 April 2023)
- Bantaeng.go.id (2022) <https://dukcapil.kemendagri.go.id/> (diakses pada 10 April 2023)
- Bogdan, Robert & Taylor, Steven. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Domas, Yustira O. 2022. *Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Online Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Duncan, Walter J. (1981). *Organization Behavior*. Boston: Houghton Mifflin.
- Forman, M. (2005). Using IT to Transform the Effectiveness and Efficiency of Government. *Journal E-Government and Information Technology*. (1): 25-28
- Gibson, James L., Ivancevich, John M., Donnelly, James H. (1997). *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hidayat, Ara & Machali, Imam. (2012). *Pengelolaan Pendidikan*. Bandung: Kaukaba.
- Indrajit, Eko R. 2002. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Irawati, Nike. (2013). *Hubungan Kualitas Pegawai dengan Efektivitas Organisasi di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau*. Naskah Publikasi. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Ivancevich, John M., Gibson, James L., Donnelly, James H. (1997). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Juemi. (2013). Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kinerja Pegawai pada Dinas Pendidikan Kota Palu. *Jurnal Academica Fisip Untad*. 5(1): 1013-1017.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2003) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

- Kabupaten Bantaeng (2016) Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- Kabupaten Bantaeng (2021) Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- Kementerian Dalam Negeri (2019) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
- Kementerian Dalam Negeri (2020) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2017) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)
- KBBI (2016) *Definisi Efektif*. www.kemendikbud.go.id. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif> pada 12 September 2022
- KBBI (2016) *Definisi Pelayanan*. www.kemendikbud.go.id. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelayanan> pada 27 Juli 2022
- KBBI (2016) *Definisi Publik*. www.kemendikbud.go.id. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/publik> pada 30 Juli 2022
- Lukman, Syamsuddin. (2000). *Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep Aplikasi dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Martani, Huseini & Lubis, Hari. (1987). *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moenir, H. A. S. (1998). *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa, E. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasa, E., Suryaningsih, M., Subowo, A. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

- Kota Semarang dalam Penarikan Pajak Reklame di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management*. 3(3): 1-14
- Nawawi, Zaidan. (2013). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- OECD. (2016). *Kajian Open Government: Indonesia Hal-Hal Pokok*. Indonesia: OECD Publishing.
- Pangestu, Rizky A. 2022. *Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Layanan Online Sidilan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat*. Skripsi. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Pedrosa, Vitor G., Kosloski, Ricardo A. D., de Menezes, Vitor G., Iwama, Gabriela Y., da Silva, Wander C. M. P., da C. Figueiredo, Rejane M. (2020). A Systematic Review of Indicators for Evaluating the Effectiveness of Digital Public Services. *Information*. 11 (10): 472
- Pemerintah Indonesia (2003) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
- Pemerintah Indonesia (2019) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PTSE)
- Pemerintah Indonesia (2012) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Pemerintah Indonesia (2018) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pemerintah Indonesia (2022) Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
- Priansa, Donny J. & Garnida, Agus. (2012). *Manajemen Perkantoran*. Bandung: Alfabeta.
- Rahmadana, Muhammad F., Mawati, Arin T., Siagian, N., Perangin-angin, Mori A., Refelino, J. (2020). *Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Republik Indonesia (2008) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Republik Indonesia (2006) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Republik Indonesia (2009) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

- Reskiandana, F. 2021. *Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Online (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas)*. Skripsi. Banyumas: Universitas Jenderal Soedirman.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambela, Lijan P. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetopo, Hendyat. (2010). *Perilaku Organisasi: Teori dan Praktek di Bidang Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Steers, Richard M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Suharto, Iman. (1995). *Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional*. Jakarta: Erlangga.
- Sutrisno, Edy. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tika, Moh. Pabundu. (2006). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Achmad. 2020. Aktivasi KTP dan Pengurusan Adminduk di Bantaeng Bisa Lewat Online, Begini Cara Aksesnya. <https://makassar.tribunnews.com/2020/08/29/aktivasi-ktp-dan-pengurusan-adminduk-di-bantaeng-bisa-lewat-online-begini-cara-aksesnya>. (diakses pada 22 Juni 2022)
- Rizka, Fitriani Aulia. 2020. Warga Bantaeng Urus Berkas Catatan Sipil Lebih Mudah. <https://www.tagar.id/warga-bantaeng-urus-berkas-catatan-sipil-lebih-mudah>. (diakses pada 24 Juni 2022)

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dien Fakhur Razi

Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 9 November 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : BTP Blok AC, Jl. Kesatuan 15

Nomor Telepon : 089503830409

Email : [dienfahurrrazi@gmail.com](mailto:dienfahurrrazi@gmail.com)

Nama Orang Tua :

- Ayah : Samsud Samad
- Ibu : Siti Fatimah Bagenda

### Riwayat Pendidikan

1. SDN No. 5 Lembang Cina Bantaeng
2. SMP Negeri 1 Bantaeng
3. SMA Negeri 1 Bantaeng

4. Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Publik

### **Riwayat Organisasi**

1. Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi (Humanis) FISIP Unhas
2. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Isipol Unhas
3. Kejar Mimpi Makassar

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat: Jl. Kartika No. 2, Kab. Bantaeng, email: [dpmptsp.bantaengkab@gmail.com](mailto:dpmptsp.bantaengkab@gmail.com), website: [dpmptsp.bantaengkab.go.id](http://dpmptsp.bantaengkab.go.id)

**IZIN PENELITIAN**

NOMOR : 503/65/IPL/DPM-PTSP/III/2023

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : DIEN FAKHRUR RAZI  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
N I M : E011181307  
No KTP : 7303020911000002  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar  
Alamat : BTN Arakeke Kel. Lembang Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :  
" Efektifitas Pelayanan Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng"

Lokasi Penelitian : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng

Lama Penelitian : 07 Maret 2023 s.d. 31 Maret 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat- istiadat Daerah setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantaeng;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng  
Pada tanggal : 07 Maret 2023  
a.n. **BUPATI BANTAENG**

Dinas Penanaman Modal dan PTSP



**YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP**  
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Jl. A. Mannappiang No. .... Telp/Fax (0413) 22765

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/01/Dukcapil/IV/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini, Kasubag Umum Dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng menerangkan bahwa:

Nama : DIEN FAKHRUR RAZI  
Nim : E011181307  
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK  
Alamat : BTN ARAKEKE

Benar telah melakukan penelitian dari tanggal 1 Maret sampai dengan 1 April 2023, dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul, Efektifitas Pelayanan Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 2 Mei 2023

An: **KEPALA DINAS**  
**Kasubag Umum dan Kepegawaian**



**SUDARNIATI, S. Pd**  
Pangkat: Penata. III/C  
Nip : 19780212 20111 2 001



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, 2023



Bersama Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, 16 Maret 2023



Bersama Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, 17 Maret 2023



Bersama Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, 5 April 2023



Bersama Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, 17 Maret 2023



Bersama Operator Layanan Administrasi Berbasis Kewenangan Desa (LABKD), 16 Maret 2023



Wawancara dengan S, 16 Maret 2023





Wawancara dengan R, 15 Juni 2023



Wawancara dengan K, 15 Juni 2023



Wawancara dengan D, 15 Juni 2023